

Bupati Buton Tengah Azhari Tegaskan Tak Ada Dana Siluman di Dapur Sekolah Rakyat



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON TENGAH, DT - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menegaskan bahwa pembangunan dapur pada Sekolah Rakyat telah melalui mekanisme anggaran yang sah, menyusul merebaknya tuduhan adanya 'dana siluman' dalam proyek tersebut. Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Bupati Azhari dalam kegiatan dialog publik yang digelar oleh HIPPMAS Raya KDI.

Kontroversi soal dugaan dana siluman mencuat setelah pembentukan panitia khusus (pansus) di tubuh DPRD Buton Tengah. Pemerintah daerah menilai tuduhan tersebut

Lanjut ke Hal: 7

Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Tinjau Langsung Kerja Bakti Massal Dukung Gerakan Nasional Indonesia Asri



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menggelar kerja bakti massal di berbagai titik pada Jumat (13/02/2026) sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Indonesia Asri. Aksi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya kebersihan dan mitigasi persoalan lingkungan yang terus menjadi isu nasional dan global.

Gerakan ini berlangsung serentak di sejumlah kawasan kota, mulai dari Pasar Pasar Wameo hingga lingkun-

gan Benteng Benteng Keraton Buton serta wilayah Sulaa di Kecamatan Betoambari. Seluruh area dipantau langsung oleh Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah Bolu yang memastikan kegiatan berjalan masif dan terorganisasi.

Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh jajaran organisasi perangkat daerah, tetapi juga melibatkan personel TNI, Polri, dan Batalyon Raja Wakaaka. Kehadiran unsur lintas institusi dinilai penting untuk memperkuat semangat gotong royong sebagai identitas budaya Indonesia.

Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah Bolu menegaskan bahwa kerja bakti merupakan implementasi nyata dari instruksi pemerintah pusat terkait gerakan kebersihan nasional. "Kami ingin memastikan bahwa Baubau selalu berada di garis terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan," ujarnya.

Aksi bersih-bersih tahun ini juga difokuskan pada kawasan prioritas, termasuk Masjid Islamic Center Baubau dan wilayah Pasar Wameo.

Lanjut ke Hal: 7

Pemkab Buton Selatan Gerakkan Kerja Bakti Massal 9-18 Februari Dukung Gerakan Nasional Indonesia ASRI, La Ode Harwanto: Busel Bersih Jadi Karakter Masyarakat



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi menginstruksikan pelaksanaan kerja bakti massal di seluruh wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo mengenai Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman,

Sehat, Resik, dan Indah). Kebijakan ini bertujuan memperkuat budaya bersih dan menjaga kualitas lingkungan di daerah yang tengah mendorong program "Busel Bersih".

Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 600.4/313/SETDA/2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Buton Selatan, La Ode Harwanto. Ia menegaskan bahwa

seluruh ASN, P3K, dan masyarakat umum wajib berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan. "Ini adalah gerakan bersama. Pemerintah hanya mengoordinasikan, tetapi pelaksana utamanya adalah kita semua," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Kegiatan kerja bakti akan dimulai pada 9 Feb-

Lanjut ke Hal: 7

Gubernur Sultra ASR Luncurkan Program Baru Cegah Anak Kembali ke Jalan Usai Tragedi di Perempatan PLN



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-"Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat langkah perlindungan anak jalanan setelah insiden tabrak lari yang menewaskan seorang anak pencari nafkah di perempatan lampu merah PLN Kota Kendari. Peristiwa itu kembali menyoroti kerentanan anak-anak yang bekerja di jalanan dan menjadi momentum

evaluasi sistem perlindungan sosial daerah.

Kasus tersebut melibatkan seorang anak yang sehari-hari membantu ekonomi keluarganya dengan berjualan di jalan raya. Lokasi kejadian yang merupakan kawasan padat lalu lintas menambah risiko yang selama ini dihadapi para pekerja anak di pusat kota.

Sebagai respon cepat, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka,

menawarkan pekerjaan outsourcing kepada orang tua korban agar keluarga tersebut memiliki penghasilan tetap. Upaya ini dirancang sebagai langkah untuk mencegah anak-anak kembali turun ke jalan sebagai tulang punggung keluarga.

"Saya tidak ingin ada lagi anak yang harus mempengaruhi nyawanya di jalanan hanya untuk men-

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Tengah Azhari Tegaskan Tak Ada Dana Siluman di Dapur Sekolah Rakyat

tidak sejalan dengan fakta penganggaran yang telah dibahas secara terbuka bersama legislatif.

Dalam forum dialog tersebut, Azhari menyinggung bahwa penggunaan istilah siluman tidak berdasar. "Siluman itu sesuatu yang tidak terlihat. Sementara anggaran Sekolah Rakyat jelas dibahas di DPRD," kata Azhari di hadapan peserta. Ia menilai istilah tersebut menyesatkan dan dapat merusak persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Penjelasan disampaikan setelah muncul pertanyaan mengenai alasan pembangunan dapur Sekolah Rakyat dilakukan lebih awal dari pengesahan perubahan anggaran. Menurut Azhari, kondisi mendesak menjadi pertimbangan utama. "Kalau menunggu perubahan anggaran, kita tidak dapat alokasi pembangunan Sekolah Rakyat," ujarnya.

Azhari menegaskan bahwa pemerintah memutuskan menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk

mempercepat realisasi pembangunan agar sekolah dapat menerima siswa tepat waktu pada akhir Juli. Ia kembali menekankan, "Dipakai BTT itu bisa, sepanjang ada kebutuhan mendesak yang menyangkut pelayanan publik."

Pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan sebelum perubahan anggaran yang biasanya disahkan pada Oktober. Pemerintah menganggap penundaan pembangunan berpotensi menghambat persiapan jasa pendidikan bagi masyarakat. Kondisi itu, menurut Azhari, memenuhi syarat penggunaan BTT sesuai regulasi keuangan daerah.

Dinamika penggunaan dana BTT bukan hal baru dalam tata kelola pemerintahan, baik di Indonesia maupun negara lain. Secara historis, pemerintah pusat maupun daerah kerap mengandalkan BTT untuk penanganan kebutuhan tak terduga, seperti bencana, keterlambatan anggaran, maupun pelayanan mendesak. Di tingkat

global, sejumlah negara bahkan memiliki emergency fund yang dapat segera dicairkan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat tanpa harus menunggu persetujuan politik yang memakan waktu.

Dalam konteks nasional, penggunaan dana darurat untuk program mendesak tercatat pada beberapa kebijakan, seperti percepatan pembangunan sekolah pascabencana di Aceh tahun 2005 serta pembangunan fasilitas pendidikan sementara di Lombok pada 2018. Sejumlah negara seperti Jepang dan Selandia Baru juga menerapkan sistem serupa dengan memanfaatkan dana cadangan untuk pemulihan cepat layanan publik.

Azhari menekankan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kepentingan selain memastikan proses belajar mengajar tidak terhambat. Ia menyebut pembangunan dapur Sekolah Rakyat merupakan kebutuhan yang bersifat operasional, bukan proyek yang bisa ditunda. "Kita harus segera

siapkan fasilitasnya karena ini menyangkut kesiapan sekolah menerima siswa," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD, namun berharap kritik yang berkembang tetap berlandaskan data. Menurutnya, tuduhan yang tidak berdasar dapat memunculkan kegaduhan di masyarakat dan mengganggu fokus pembangunan.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan persepsi publik sekaligus mengakhiri polemik yang berkembang. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan Sekolah Rakyat tetap berada dalam jalur konstitusional dan mengikuti prosedur keuangan daerah.

Dengan penjelasan resmi tersebut, pemerintah berharap ke depan seluruh polemik dapat diselesaikan dengan dialog terbusi dan fakta anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. (*)

Gubernur Sultra ASR Luncurkan Program Baru Cegah Anak Kembali ke Jalan Usai Tragedi di Perempatan PLN

cari nafkah," ujar Gubernur saat mengunjungi keluarga korban, Jumat (6/2/2025). Ia menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja yang lebih aman bagi warga rentan.

Inisiatif tersebut kemudian diperluas dengan rencana koordinasi bersama Pemerintah Kota Kendari. Kedua pemerintah berkomitmen memperketat pendataan dan penertiban anak jalanan sekaligus mencari solusi pekerjaan bagi orang tua atau pengemis yang masih memiliki kemampuan bekerja.

Menurut Gubernur, penanganan tidak boleh berfokus pada penertiban semata. "Masalah ini harus diselesaikan dari akarnya, yakni faktor ekonomi keluarga," katanya. Ia menambahkan bahwa pemberdayaan melalui pekerjaan outsourcing adalah salah satu solusi realistis.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara tengah menyiapkan skema pelatihan terintegrasi untuk menekan jumlah anak jalanan di wilayah perkota-

an. Program tersebut mencakup pembinaan psikososial, pemberdayaan keluarga, dan pemenuhan hak-hak dasar anak.

Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa pihaknya akan mengaktifkan kembali rumah singgah sebagai pusat rehabilitasi sosial. "Kami memastikan anak-anak yang terjaring tidak hanya diamankan sementara. Mereka akan mendapat pendampingan hingga siap kembali bersekolah atau mengikuti pelatihan vokasi," ujarnya pada Kamis (12/2/2026).

Rumah singgah itu nantinya berfungsi sebagai titik awal pemulihan anak-anak sebelum diarahkan ke jalur pendidikan atau keterampilan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memutus siklus pekerja anak yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan di banyak daerah Indonesia.

Secara nasional, data historis menunjukkan bahwa fenomena anak jalanan telah menjadi persoalan sejak era 1980-an ketika urbanisasi besar-besaran mulai terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya,

dan Medan. Jumlah anak jalanan sempat mencapai lebih dari 232.000 pada awal 2000-an berdasarkan catatan Kementerian Sosial.

Dalam konteks global, masalah serupa juga terjadi di negara-negara berkembang, termasuk India, Brasil, dan Filipina. UNICEF mencatat bahwa ratusan ribu anak di kawasan Asia Tenggara bekerja di jalan raya, menghadapi risiko kecelakaan, eksploitasi, hingga kekerasan fisik.

Langkah yang ditempuh Pemprov Sultra kini menjadi bagian dari tren global yang menekankan pendekatan perlindungan anak berbasis keluarga. Program pemberdayaan ekonomi dinilai sebagai cara paling efektif untuk mengurangi angka pekerja anak dalam jangka panjang.

Dengan serangkaian upaya ini, pemerintah daerah berharap tragedi serupa tidak terulang. Penanganan komprehensif diyakini dapat membuka peluang bagi anak-anak untuk kembali pada hakikatnya sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa. (*)

Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Tinjau Langsung Kerja Bakti Massal Dukong Gerakan Nasional Indonesia Asri

OPD yang terlibat di lokasi tersebut antara lain Dinas Kominfo, PUPR, Sekretariat DPRD, Dinas Perikanan, Dikmudora, Bapas Baubau, dan pemerintah kelurahan.

Di sisi lain, wilayah Melai dan Sulaa diarahkan untuk pembersihan drainase serta pengangkatan tumpukan sampah. Kedua area tersebut dipilih karena memiliki intensitas permasalahan lingkungan yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya.

Hamsinah menambahkan bahwa gera-

kan kebersihan bukan hanya program sesaat, melainkan agenda berkelanjutan. "Kebersihan adalah budaya. Itu harus dimulai dari rumah kita sendiri," katanya menekankan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Ia juga meminta perangkat RT dan RW menjadi penggerak utama dalam menumbuhkan kesadaran warga. "RT dan RW adalah ujung tombak edukasi lingkungan. Perannya sangat vital," tutur Hamsinah.

Secara historis,

gerakan kebersihan massal telah menjadi bagian dari budaya nasional. Pada era 1980-an, Indonesia pernah dikenal dengan program Jumat Bersih sebagai bentuk kedisiplinan kolektif warga. Di tingkat global, kampanye seperti World Clean Up Day yang melibatkan lebih dari 150 negara juga menunjukkan betapa pentingnya aksi komunitas dalam menyelamatkan lingkungan.

Pemkot Baubau berharap aksi ini dapat

meningkatkan kualitas lingkungan urban sekaligus menjadi bagian dari kontribusi nasional terhadap target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin terkait kota berkelanjutan.

Melalui kerja bakti massal ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya menjadikan Baubau sebagai kota yang bersih, sehat, dan resilien terhadap tantangan lingkungan di masa depan. (*)

memastikan kontinuitas program pembersihan lingkungan yang sebelumnya telah berjalan cukup baik.

Sementara itu, para camat, kepala desa, dan lurah diminta mengoordinasikan pembersihan di wilayah kerja masing-masing. Mereka menjadi ujung tombak dalam menjaga konsistensi kegiatan kebersihan di tingkat lokal. "Wilayah Anda adalah tanggung jawab Anda. Kami ingin melihat perubahan yang konkret," ujar La Ode Harwanto dalam salah satu kutipannya.

Selain kerja bakti massal, seluruh lingkungan kerja pemerintah juga diwajibkan melaksanakan gerakan peduli sampah minimal satu kali setiap minggu. Rutinitas tersebut dirancang agar perilaku disiplin dalam pengelolaan sampah dapat meningkat secara signifikan.

Pemerintah juga

menetapkan korvei atau kerja bakti harian selama satu jam sebelum aktivitas kantor dimulai. Ketentuan ini diterapkan untuk membangun kebiasaan jangka panjang mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kerja.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buton Selatan ditunjuk sebagai koordinator keseluruhan kegiatan. Instansi tersebut bertanggung jawab memantau pelaksanaan di seluruh wilayah serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada pimpinan daerah.

Gerakan kebersihan serupa sebenarnya bukan hal baru, baik secara nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia pernah menggerakkan program "Sabtu Bersih" pada era 1980-an sebagai kampanye menciptakan lingkungan sehat. Di tingkat global, Jepang dikenal den-

gan budaya cleaning time di sekolah dan lingkungan, yang terbukti meningkatkan disiplin kebersihan masyarakat.

Dengan merujuk pada sejarah tersebut, Pemkab Buton Selatan berharap gerakan "Busel Bersih" dapat membentuk budaya kolektif dan berkelanjutan. "Kami ingin kebersihan bukan hanya kegiatan mingguan, tetapi menjadi karakter masyarakat Busel," kata Sekda La Ode Harwanto.

Melalui langkah terstruktur ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik, penurunan volume sampah berserakan, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ruang publik secara mandiri. Gerakan ini diharapkan menjadi fondasi menuju wilayah yang aman, sehat, asri, dan nyaman bagi seluruh warga. (*)

Pemkab Buton Selatan Gerakkan Kerja Bakti Massal 9-18 Februari Dukong Gerakan Nasional Indonesia ASRI, La Ode Harwanto: Busel Bersih Jadi Karakter Masyarakat

ruari hingga 18 Februari 2026 dengan waktu pelaksanaan yang dapat disesuaikan oleh masing-masing

satuan kerja. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung efektif dan tidak menggang-

gu layanan publik.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan untuk kembali ke loka-

si pembersihan yang pernah menjadi titik aksi "Busel Bersih" pada tahun 2025. Instruksi ini diharapkan

KPU Buton Selatan Sosialisasikan PKPU 3/2025 sebagai Aturan Baru PAW, Tekankan Kepastian Hukum dan Transparansi



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, DT - Upaya memperkuat tata kelola keanggotaan legislatif terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Selatan melalui kegiatan sosialisasi mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 12 Februari 2026, di Aula Kantor KPU ini menghadirkan unsur pemerintah, aparat keamanan, serta perwakilan partai politik di tingkat kabupaten.

Pada kegiatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan komprehensif mengenai implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025, regulasi terbaru yang menjadi landasan teknis pelaksanaan PAW. Aturan ini disusun sebagai respon atas kebutuhan penataan legislasi nasional, sekaligus penegasan agar mekanisme pergantian anggota legislatif berjalan tertib dan terarah.

Kehadiran sejumlah pihak strategis seperti Kesbangpol Kabupaten Buton Selatan, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, jajaran Polres Batauga, aparat Kapolsek Batauga, serta unsur TNI dari Kodim 1413 Buton menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal regulasi

tersebut di tingkat lokal.

Ketua KPU Buton Selatan menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus memastikan proses PAW dapat dipahami dan dilaksanakan secara benar oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi keraguan terkait prosedur PAW. Aturannya jelas, mekanismenya transparan, dan seluruh pihak wajib mengikuti ketentuan yang berlaku,” ujarnya di sela kegiatan.

Sosialisasi juga menghadirkan delapan partai politik yang terdaftar di Buton Selatan, yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kehadiran mereka sekaligus mempertegas pentingnya kolaborasi politik dalam menjaga stabilitas demokrasi.

Dalam sesi paparan, KPU menjelaskan bahwa PAW merupakan mekanisme yang telah berlangsung sejak masa awal demokrasi parlementer Indonesia, dan secara global telah menjadi standar dalam menjaga kesinambungan fungsi legislasi. Negara-negara seperti Jerman, Jepang,

dan Korea Selatan pun menerapkan mekanisme serupa melalui proses administratif yang ketat dan berbasis hukum.

Peserta mendapatkan penjelasan mengenai alasan pentingnya PAW, terutama ketika terjadi kekosongan kursi anggota legislatif akibat pengunduran diri, meninggal dunia, atau pelanggaran etik dan hukum. KPU menekankan bahwa proses penggantian hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti sah dan verifikasi administrasi yang ketat.

Seorang perwakilan Bawaslu menilai sosialisasi ini penting untuk mencegah kesalahan administratif. “Pencegahan lebih baik daripada penindakan. Sosialisasi seperti ini memastikan seluruh pihak memahami aturan, sehingga potensi sengketa bisa diminimalisasi,” ucapnya menegaskan.

Lebih lanjut, aparat kepolisian menyoroti pentingnya pengawasan keamanan dalam setiap proses politik. “Kami siap mendukung setiap tahapan, terutama bila menyangkut stabilitas daerah,” kata salah satu perwira Polres Batauga.

Selain itu, KPU juga menguraikan bagaimana perubahan aturan PAW menjadi bagian dari evolusi sistem politik Indonesia. Sejak reformasi 1998,

penataan regulasi pemilu terus mengalami perbaikan untuk menghindari manipulasi politik, termasuk dalam hal pergantian anggota legislatif. Regulasi terbaru ini menjadi bagian dari upaya pembaruan nasional tersebut.

Pihak TNI dari Kodim 1413 Buton juga mengapresiasi kegiatan ini, sambil menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. “Sinergi diperlukan, karena urusan politik yang sehat akan mendukung keamanan wilayah,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif melalui sesi diskusi, tanya jawab, dan studi kasus mengenai pelaksanaan PAW di daerah lain di Indonesia. Peserta menyambut baik materi yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan verifikasi dokumen dan alur administratif dari proses pergantian anggota dewan.

Di akhir kegiatan, KPU Buton Selatan menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga integritas proses demokrasi daerah. Melalui sosialisasi ini, diharapkan tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat dapat memahami bahwa PAW adalah mekanisme hukum yang bertujuan menjaga keberlanjutan roda pemerintahan. (*)

Emil Hadiri Pelantikan Golkar, Bahlil Lontarkan Ajakan Bernuansa Gojekan



Laporan: Alwan

SURABAYA, BP-Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melontarkan gurauan bernuansa ajakan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam pelantikan pengurus DPD Golkar se-Jawa Timur di Surabaya, Minggu (15/2/2026). Candaan itu memicu riuh tawa ribuan kader yang menghadiri kegiatan tersebut.

Acara pelantikan yang berlangsung dihadapan sekitar tiga ribu kader itu turut dihadiri sejumlah tokoh politik daerah, termasuk Emil yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kehadiran Emil menjadi sorotan karena ia merupakan kader Partai Demokrat sekaligus Ketua DPD Demokrat Jawa Timur.

Dalam pidatonya, Bahlil menyinggung hubungan Golkar dengan beberapa partai lain yang disebutkan berjalan harmonis. Ia mencontohkan jalinan komunikasi politik antara Golkar, NasDem, Hanura, Gerindra hingga Partai Demokrat yang selama ini terjalin dalam berbagai momentum politik nasional.

Bahlil kemudian melontarkan candaan yang diarahkan kepada Emil. “Pak Wagub ini saya lihat mulai goyang. Kalau hatinya sudah mulai

nyaman, ya tidak apa-apa juga masuk Golkar,” ujarnya, yang langsung disambut tawa peserta acara.

Emil tidak memberikan respons langsung atas gurauan itu, namun ia tetap mengikuti rangkaian kegiatan secara formal. Hal ini memunculkan spekulasi ringan di kalangan peserta mengenai kemungkinan dinamika politik Jawa Timur ke depan.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil menekankan bahwa perpindahan kader antarpolitical bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Ia mengibaratkan adanya fenomena ‘hijrah sementara’ yang menurutnya kerap terjadi dalam sejarah perpolitikan di Tanah Air. “Kalau rindu pulang, silakan kembali. Kita satu rumah, hanya beda kamar,” ujarnya.

Secara historis, perpindahan atau migrasi politik memang bukan fenomena baru. Di Indonesia, dinamika tokoh berpindah partai telah terjadi sejak era multipartai pascareformasi 1998. Di level internasional, praktik serupa terjadi di banyak negara demokrasi, seperti Amerika Serikat yang mengenal istilah party switching, salah satu contohnya ketika Senator Jim Jeffords keluar dari Partai Republik pada 2001 dan mengubah peta kekuatan Senat AS saat itu.

Kembali ke acara pelantikan, Bahlil menyampaikan bahwa Golkar kini memprioritaskan penguatan struktur organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Konsolidasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menghadapi agenda politik nasional di masa depan.

Pelantikan pengurus DPD Golkar Jatim menjadi momentum penting bagi partai berlambang pohon beringin tersebut untuk menegaskan kesiapan organisasi menjelang berbagai kontestasi politik. Ribuan kader yang hadir menunjukkan antusiasme terhadap arah baru konsolidasi di wilayah Jawa Timur.

Bahlil menutup sambutannya dengan apresiasi terhadap adap seluruh pihak yang hadir, termasuk tokoh lintas partai. Menurutnya, kehadiran mereka mencerminkan iklim politik Jawa Timur yang tetap menjunjung komunikasi dan saling menghargai di tengah dinamika politik nasional.

Dengan dinamika yang muncul dari candaan hingga strategi konsolidasi, acara tersebut memperlihatkan bagaimana komunikasi politik Golkar terus digalakkan sebagai upaya mempertahankan pengaruh partai di tingkat daerah maupun nasional. (*)

Dukung Indonesia Asri, Pemprov Sultra Bersih-Bersih Kota Kendari Libatkan TNI, Polri, ASN hingga Pelajar



Laporan: Lisna

S U L - TRA,DT-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan apel gabungan sekaligus aksi bersih kota di sejumlah titik strategis di Kota Kendari pada Selasa, 10 Februari 2026. Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia serta bagian dari upaya mendukung Gerakan Indonesia Asri.

Aksi bersih-bersih ini melibatkan unsur TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pelajar SMA. Seluruh peserta terlibat dalam kegiatan secara serempak di beberapa titik yang telah ditetapkan sebagai lokasi utama pembersihan.

Tiga titik yang menjadi fokus pembersihan meliputi kawasan Area Eks-MTQ, bantaran Kali Kadia, dan lingkungan sekitar Pasar Sentral Kota Kendari. Lokasi-lokasi ini dipilih karena merupa-

kan ruang publik yang memiliki intensitas aktivitas masyarakat cukup tinggi.

Dalam arahnya, Gubernur Sulawesi Tenggara menekankan bahwa kebersihan bukan hanya sebatas menjalankan instruksi, tetapi mencerminkan karakter dan tanggung jawab bersama. Ia menyebutkan bahwa lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang nyaman dan berpengaruh pada pola pikir masyarakat.

“Kalau bersih, enak dilihat. Suasana bersih membuat pikiran kita juga bersih. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini bukan hanya perintah Presiden yang harus dijabarkan, tetapi demi keindahan dan kenyamanan kita sendiri,” tegasnya dalam sambutan.

Selain itu, Gubernur menyoroti pentingnya estetika kota sebagai wajah ibu kota provinsi. Ia menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan tidak boleh bersifat

seremonial atau dilakukan hanya menjelang agenda tertentu, tetapi harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Menurutnya, kesan pertama pengunjung terhadap suatu daerah sering kali dilihat dari kebersihan, kerapian, dan keramahan masyarakatnya. Karena itu, ia meminta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat menjaga kondisi lingkungan agar tetap nyaman dan tertata.

Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan agar kegiatan pembersihan dilakukan secara rutin setiap hari Jumat. Pelaksanaannya dimulai dengan apel yang dipusatkan di satu titik sebelum peserta bergerak ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

Ke depan, sektor-sektor kebersihan akan dibagikan berdasarkan tanggung jawab masing-masing instansi dan akan diawasi oleh TNI dan Polri. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan

sistem kerja yang lebih efektif dan terkoordinasi dalam menjaga kebersihan Kota Kendari.

“Kota Kendari harus menjadi kota yang bersih dan bisa menjadi contoh bagi ibu kota provinsi lainnya,” ujarnya menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keasrian lingkungan.

Pada akhir arahnya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam aksi tersebut. Ia juga mengingatkan para peserta untuk tetap memperhatikan aspek keselamatan selama melaksanakan kegiatan pembersihan.

Aksi bersih kota kemudian berlangsung di tiga titik utama dengan antusiasme seluruh peserta, menandai komitmen bersama dalam mendukung Gerakan Indonesia Asri sekaligus memperkuat budaya hidup bersih di Sulawesi Tenggara (*)

Gubernur Sultra ASR Dorong Transformasi Birokrasi Digital untuk Layanan Transparan



Laporan: Mashuri

SULTR, BP-Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mempercepat transformasi birokrasi dan penerapan e-government kembali ditegaskan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dalam Simposium Nasional Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) di Kampus Universitas Muhammadiyah Kendari, Selasa, 10 Februari 2026.

Simposium yang mengangkat tema “Transformasi Digital dan E-Government dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif dan Transparan” itu menjadi ruang diskusi akademik terkait tantangan tata kelola pemerintahan era digital. Gubernur hadir sebagai keynote speaker dan membawakan paparan yang menitikberatkan pada urgensi inovasi birokrasi.

Dalam pemaparannya, Andi Sumangerukka menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren administrasi modern, tetapi kebutuhan esensial untuk menjawab perubahan zaman. “Transformasi birokrasi dan e-government tidak bisa ditunda. Ini bagian dari cara kita beradaptasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat dan akuntabel,” ujarnya.

Kegiatan tersebut mendapat perhatian luas dari civitas akademika karena menghadirkan diskursus antara kebijakan daerah dan perkembangan konsep pemerintahan digital secara nasional maupun global. Ketua AIPPTM, Prof. Dr. Tri Sulistyanyingsih, M.Si., menyebut langkah Sulawesi Tenggara sebagai contoh progresif. “Sulawesi Tenggara adalah rookie yang cepat naik kelas dalam

digitalisasi pemerintahan,” katanya.

Prestasi tersebut merujuk pada capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam kategori Rookie of the Year pada program Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Lompatan ini dinilai signifikan, mengingat pada 2023 provinsi tersebut berada di posisi terbawah, yakni peringkat ke-34 dari 34 provinsi.

Dalam perkembangan terbarunya, Sulawesi Tenggara mampu naik ke peringkat 16 dari 38 provinsi. Peningkatan itu dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi digitalisasi layanan, termasuk sistem pembayaran digital, transparansi anggaran, dan integrasi administrasi publik.

Secara global, perkembangan e-government telah menjadi indikator kemajuan suatu negara. Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis UN E-Government Development Index (EGDI) pada 2003, digitalisasi pemerintahan menjadi tolok ukur modernisasi layanan publik. Negara seperti Denmark, Korea Selatan, dan Estonia kerap menjadi rujukan internasional dalam integrasi sistem digital.

Indonesia sendiri telah memulai agenda reformasi birokrasi digital sejak diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yang kemudian diperkuat oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, kesenjangan kapasitas daerah masih menjadi tantangan berkelanjutan.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya

menekankan aspek penting yang sering diabaikan dalam digitalisasi: kesiapan sumber daya manusia aparatur. “Kunci keberhasilan e-government bukan hanya teknologi, tetapi juga SDM. ASN harus siap berubah, berintegritas, profesional, dan mampu beradaptasi dengan teknologi,” ujarnya menegaskan.

Ia menambahkan bahwa perubahan pola pikir birokrasi harus dimulai dari pucuk pimpinan. “Kalau ingin pemerintahan yang bersih, perubahan dimulai dari kepemimpinan. Itu sebabnya saya ingin membangun sistem yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Simposium yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Kendari itu menjadi momentum penting bagi pemangku kebijakan dan akademisi memperkuat kolaborasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan digital yang responsif. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan mengenai tantangan dan strategi penguatan digitalisasi administrasi publik.

Melalui paparannya, Gubernur menegaskan bahwa tujuan akhir transformasi digital adalah kesejahteraan masyarakat. “Pada dasarnya saya hanya berpikir dua hal: menyelesaikan masalah dan menyejahterakan masyarakat. Teknologi hanyalah jembatan untuk mempercepat itu,” ungkapnya.

Acara ditutup dengan penegasan bahwa transparansi dan akuntabilitas melalui sistem digital merupakan pondasi untuk menciptakan pemerintahan yang modern dan berintegritas, selaras dengan tren global menuju pemerintahan terbuka (open government).(*)

Sekda Armin Pimpin Rapat Evaluasi APBD 2025, Pemkab Buteng Fokus Perbaiki Tata Kelola Anggaran



Laporan:Ardi

BUTENG, BP-Kabupaten Buton Tengah menggelar rapat evaluasi serta percepatan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2026 di Aula Pancana, Kantor Bupati Buton Tengah, Kamis (12/2/2026). Agenda ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja penyerapan anggaran yang pada tahun sebelumnya dinilai belum optimal.

Rapat dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Buton Tengah, Armin, S.Pd., M.Si., yang turut dihadiri jajaran staf ahli, para asisten, kepala OPD, camat, dan kepala bagian lingkup Pemkab Buton Tengah. Kehadiran unsur pimpinan perangkat daerah ini menandai komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Dalam arahnya, Armin menekankan bahwa hasil evaluasi APBD 2025 menjadi alarm penting bagi seluruh OPD. "Kita tidak boleh mengulangi tingkat penyerapan anggaran yang rendah seperti tahun lalu. Tahun 2026 harus kita jalankan lebih cepat, lebih tertib, dan tepat sasaran," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa per-

cepatan realisasi anggaran tidak dapat dipisahkan dari ketertiban administrasi keuangan. Sistem aliran kas yang dikelola BPKAD wajib menjadi acuan dalam setiap proses pencairan dana. Menurut Armin, penerapan sistem yang disiplin merupakan kunci transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Selain mengevaluasi kondisi penyerapan tahun sebelumnya, rapat juga membahas strategi percepatan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2026 melalui aplikasi SIRUP UKPBJ. Armin menyebut bahwa keterlambatan penginputan RUP menjadi salah satu faktor yang sering menghambat pembangunan. "RUP harus segera diinput. Jangan menunggu mendekati batas waktu," ujarnya.

Dari sisi perencanaan jangka panjang, pemerintah daerah mulai mendorong persiapan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027. Para kepala OPD dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diminta segera menyusun usulan program melalui mekanisme Musrenbang serta memperkuat koordinasi dengan Bappeda agar per-

encanaan berjalan komprehensif.

Bagian Pemerintahan Setda diberi instruksi khusus untuk mempercepat penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Kedua laporan ini merupakan dokumen penting yang menjadi indikator akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) diwajibkan fokus menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam konteks nasional, SAKIP menjadi standar kinerja yang telah digunakan sejak 1999 untuk memperkuat budaya kerja berbasis hasil. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura bahkan lebih dulu menerapkan sistem pengukuran kinerja yang ketat, menjadi rujukan internasional dalam tata kelola efektif.

Secara historis, Pemerintah Indonesia sejak reformasi fiskal awal 2000-an mendorong manajemen anggaran berbasis kinerja untuk memastikan efisiensi

penggunaan APBD dan APBN. Penguatan mekanisme akuntabilitas di tingkat daerah menjadi bagian dari implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengacu pada praktik global.

Dalam kesempatan rapat evaluasi itu, Armin kembali mengingatkan pentingnya sinergi antarlembaga. "Tidak akan ada OPD yang berhasil bekerja sendiri. Koordinasi adalah kunci agar pelayanan publik meningkat dan pembangunan berjalan sesuai target," katanya.

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap rapat evaluasi ini menjadi momentum mempercepat kinerja pemerintahan, khususnya dalam tata kelola anggaran, pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan daerah. Komitmen perbaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang.

Melalui penguatan koordinasi dan disiplin pelaksanaan anggaran, Pemkab Buton Tengah menegaskan visi pembangunan yang lebih cepat, tepat, dan berdampak bagi masyarakat. (*)

Pangan Terjangkau Hadir di GPM Butur untuk Lindungi Daya Beli Warga Jelang Ramadan



Laporan: Kasrun

BUTON UTARA, DT- Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 H, Pemerintah Kabupaten Buton Utara menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di Balai Pertemuan Desa Wantulasi, Kecamatan Wakorumba Utara, tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rahman pada Sabtu (14/2/2026).

Pelaksanaan GPM tahun ini menjadi penting karena konsumsi masyarakat biasanya meningkat menjelang Ramadhan. Kehadiran pangan terjangkau dinilai mampu menjadi bantalan ekonomi pada kelompok masyarakat rentan. Pemerintah berharap langkah ini menekan potensi inflasi yang kerap melonjak pada awal puasa.

Dalam sambutannya, Rahman menegaskan bahwa GPM merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. "Pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan pokok dapat dijangkau masyarakat. GPM ini bagian dari tanggung jawab kami menjaga stabilitas harga," ujarnya.

Program ini menyediakan sejumlah bahan pangan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, hingga bawang merah dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kebijakan pasar murah ini secara historis telah

menjadi instrumen pemerintah Indonesia sejak era Orde Baru untuk mengendalikan inflasi musiman, terutama menjelang hari besar keagamaan.

Selain itu, sejumlah negara lain seperti India, Malaysia, dan Mesir juga rutin menggelar food subsidy market menjelang ritual keagamaan besar untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan serupa kini kembali diadopsi pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Buton Utara.

Rahman menambahkan bahwa GPM tidak hanya sekadar program distribusi pangan murah, tetapi juga wujud kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPS, TNI, serta OPD lainnya. "Kami ingin memastikan harga tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan pasokan aman menjelang Ramadhan," katanya.

Pelaksanaan GPM di Wantulasi juga menjadi momentum konsolidasi antarinstitusi dalam memeriksa kondisi stok pangan daerah. Dalam periode 2020-2024, data nasional menunjukkan bahwa operasi pasar mampu menurunkan potensi inflasi komoditas pangan hingga 0,3 persen di sejumlah provinsi. Hal ini turut memperkuat alasan pemerintah daerah menjalankan program tersebut.

Antusiasme warga terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat yang memanfaatkan kesempatan berbelanja kebutuhan pokok

dengan harga lebih terjangkau. Beberapa warga menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat membantu kondisi ekonomi mereka di tengah fluktuasi harga yang kerap tidak menentu.

GPM juga didorong sebagai langkah edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam berbelanja menghadapi Ramadhan. Pemerintah mengingatkan pentingnya menjaga pola konsumsi serta memperhatikan kualitas barang yang dibeli, terutama dalam periode lonjakan permintaan.

Selain para warga, sejumlah pejabat daerah turut hadir memberikan dukungan, antara lain Anggota DPRD Butur Rustamin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdul Samad, Kepala Dinas Perindag Junaidin, Kepala BPBD Made Alwi, Kepala BPS Butur Suharjufito Endo, serta Danramil Wakorumba Utara Lettu Cke Amrin Dani.

Dengan dukungan lintas lembaga tersebut, GPM diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan yang memperkuat ketahanan pangan di Buton Utara. Pemerintah daerah juga menyatakan komitmen untuk memperluas cakupan GPM ke kecamatan lain sehingga manfaatnya lebih merata.

"Harapan kami sederhana, masyarakat dapat memasuki bulan Ramadhan dengan tenang tanpa kekhawatiran lonjakan harga," tutur Rahman menutup sambutannya. (*)

Wujudkan Sekolah Ramah Anak, SDN Tomba Baubau Serukan Gerakan Anti-Bullying



Laporan: Prasetyo M

B A U B A U, BP-Dalam upaya memperkuat gerakan perlindungan anak di lingkungan pendidikan, SD Negeri Tomba mendeklarasikan komitmen bersama untuk menghentikan praktik bullying di sekolah, Sabtu (14/02/2026). Deklarasi bertema "Anak Senang, Guru Tenang, Sekolah Nyaman, Orang Tua Bahagia" itu menjadi langkah konkret menciptakan ruang belajar yang aman dan ramah bagi siswa.

Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah tersebut dihadiri para pemangku kepentingan pendidikan, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat. Deklarasi ini sekaligus menjadi respons terhadap meningkatnya perhatian publik terhadap kasus perundungan di tingkat nasional maupun global.

Kepala SD Negeri Tomba, Arsia Abidin, S.Pd., SD., menilai bahwa dunia pendidikan perlu memperkuat keteladanan dalam membangun karakter peserta didik. Ia menyebutkan, suasana belajar yang damai adalah fondasi untuk melahirkan generasi berkualitas.

"Kami ingin anak-anak merasa aman setiap hari di sekolah. Lingkungan yang nyaman adalah syarat utama tumbuhnya keberanian dan kemandirian," ujarnya.

Deklarasi ini juga menempatkan siswa sebagai subjek utama perlindungan. Langkah tersebut sejalan dengan kampanye internasional seperti World Anti-Bullying Forum dan National Bullying Prevention Month di Amerika Serikat yang menekankan pentingnya intervensi dini dalam mencegah kekerasan psikologis maupun fisik di sekolah.

Ketua Komite SD Negeri Tomba, La Ode Muhamad Asdar, S.E., dalam kesempatan berbeda, menyampaikan bahwa perundungan dapat muncul dari hal-hal sederhana yang kerap tidak disadari. Ia menegaskan bahwa "satu kata dapat melukai, tetapi satu kata baik dapat memberi kekuatan," sehingga siswa perlu belajar memilih perkataan yang menghargai orang lain.

Dalam pandangannya, perundungan bukan hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga melalui olok-olok, julukan yang merendahkan, serta candaan yang menyakitkan. Asdar mengingatkan

bahwa setiap anak memiliki emosinya masing-masing dan tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan sosial seorang diri.

"Sekolah harus menjadi tempat di mana anak-anak merasa diterima apa adanya, bukan tempat mereka takut untuk bertanya atau berpendapat," tegasnya. Kutipan ini mencerminkan komitmen sekolah untuk memastikan siswa tidak mengalami ketidaknyamanan dalam proses belajar.

Komitmen tersebut juga didorong oleh meningkatnya kesadaran nasional terkait perlindungan anak. Di Indonesia, kasus bullying sempat menjadi perhatian publik, termasuk peristiwa-peristiwa yang mendorong pemerintah menguatkan regulasi melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan program Sekolah Ramah Anak yang digulirkan sejak 2015.

Di tingkat global, UNICEF juga mencatat bahwa satu dari tiga anak di dunia pernah mengalami bentuk perundungan. Data historis ini menjadi pengingat bahwa bullying merupakan persoalan universal yang membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan pemerintah.

Melalui deklarasi ini, SD Negeri Tomba mengangkat pesan penting mengenai per-

an siswa dalam pencegahan. Anak-anak didorong untuk saling mendukung dan tidak membiarkan temannya berada dalam situasi sulit. Tindakan sederhana seperti menemani teman yang diejek atau melapor kepada guru dapat menjadi langkah efektif dalam menghentikan rantai perundungan.

Kegiatan tersebut juga memperkuat sinergi lintas instansi. Hadir dalam acara itu perwakilan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Camat Kokalukuna; Kapolsek Kokalukuna; Lurah Waruruma; serta orang tua siswa yang memberikan dukungan penuh.

Di akhir kegiatan, seluruh warga sekolah membacakan deklarasi bersama sebagai simbol bahwa pencegahan bullying merupakan tanggung jawab kolektif. Momen ini menegaskan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang tumbuh yang harus dipenuhi rasa aman, penghargaan, dan empati.

Deklarasi kemudian ditutup dengan ajakan agar seluruh siswa SD Negeri Tomba dapat menjalani hari sekolah tanpa rasa takut, serta merasa berharga sebagai bagian dari keluarga besar pendidikan di Baubau.*

Pemerintah Siapkan Insentif Rp30 Juta untuk Dokter Spesialis di Daerah Terpencil

Peliput: Andina L

SURABAYA, BP-Pemerataan layanan kesehatan nasional kembali menjadi perhatian utama pemerintah. Mulai Januari 2026, Kementerian Kesehatan menyiapkan skema insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di wilayah terpencil. Langkah ini dilakukan untuk menjawab ketimpangan distribusi tenaga medis yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat mengatasi kekurangan dokter spesialis. "Kami ingin memastikan masyarakat di seluruh Indonesia mendapat layanan yang setara. Karena itu, dokter spesialis yang bertugas di daerah terpencil akan kita beri tambahan Rp30 juta per bulan," ujarnya.

Sejalan dengan pernyataan itu, pemerintah memperkirakan total penghasilan dokter spesialis yang ditempatkan di daerah dapat mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan. Besaran tersebut sudah termasuk gaji pokok, jasa pelayanan, dan tunjangan lainnya yang sebelumnya menjadi komponen pendapatan tenaga medis.

Kebijakan baru ini menyasar sejumlah wilayah yang selama ini dikenal kekurangan dokter spesialis, seperti Nias, Maluku, Papua, dan beberapa kawasan terluar lainnya. Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat pemerataan tenaga kesehatan menjadi tantangan berkelanjutan. Pemerintah berharap insentif besar ini dapat mempercepat penempatan dokter di wilayah tersebut.

Tidak hanya memberi tambahan pendapatan, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung

yang dianggap penting untuk kenyamanan tenaga kesehatan. Rumah dinas dan kendaraan operasional menjadi bagian dari paket pendukung tersebut. "Kita tidak hanya kasih uang, tapi juga rumah dan fasilitas supaya mereka nyaman bekerja di daerah," tambah Budi.

Distribusi dokter spesialis yang timpang bukan masalah baru bagi Indonesia. Selama lebih dari dua dekade, pemerintah menghadapi tantangan minimnya pemerataan tenaga medis, terutama di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia hanya mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis setiap tahunnya, angka yang dianggap belum memenuhi kebutuhan nasional.

Untuk mengatasi keterbatasan itu, pemerintah memperkuat program fellowship dan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Melalui skema ini, dokter dapat memperoleh kompetensi tertentu dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dibanding pendidikan reguler yang memakan waktu antara empat hingga delapan tahun. "Kalau menunggu pendidikan normal bisa lama. Karena itu fellowship kita dorong agar percepatannya signifikan," kata Budi.

Selain menambah jumlah tenaga kesehatan, pemerintah juga memperbaiki kelengkapan alat kesehatan di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan agar penempatan dokter tidak sia-sia dan pelayanan medis bisa berjalan optimal. "Percuma kita kirim dokter spesialis kalau alatnya tidak ada. Jadi alat dan SDM harus jalan bareng," tegas Budi.

Secara historis, upaya pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia sudah dimulai sejak era Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) pada awal 2010-an.

Meski berjalan, program itu dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab disparitas layanan kesehatan di berbagai daerah. Di tingkat global, negara-negara berkembang seperti India dan Filipina juga menghadapi persoalan serupa terkait distribusi dokter, bahkan beberapa negara memberikan insentif tinggi untuk menarik tenaga kesehatan menuju wilayah terpencil.

Dengan pengalaman internasional tersebut, Indonesia berharap skema terbaru ini dapat menjadi solusi yang lebih kuat. Pemerintah optimistis bahwa peningkatan pendapatan, ditambah fasilitas pendukung yang layak, dapat menarik lebih banyak dokter untuk mengabdikan diri di wilayah yang selama ini sulit terjangkau.

Kementerian Kesehatan menargetkan implementasi kebijakan ini dapat memperbaiki kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil dalam jangka menengah. Selain memperkuat akses layanan, langkah ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional.

Pemerintah juga mendorong kerja sama lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Dengan dukungan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan setempat, pemerintah yakin pemerataan tenaga medis dapat tercapai secara bertahap.

Di tengah tantangan besar yang dihadapi, kebijakan insentif ini menjadi salah satu strategi paling agresif yang pernah ditempuh pemerintah untuk menarik dokter spesialis ke daerah terpencil. Harapannya, masyarakat di seluruh pelosok negeri dapat memperoleh layanan kesehatan yang setara dan berkualitas.*

<p>PT FAREN GRAFIKA</p> <p>Harian Pagi</p> <h1>Baubau Post</h1> <p>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval</p>	<p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: Rahim Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

Kapal Kayu KM Intan Celebes Bajoe – Boepinang Tenggelam di Perairan Poleang, Nelayan Selamatkan Para Penumpang



Laporan: Firman

BOMBANA, BP Sebuah kapal penumpang rute Bajoe - Boepinang bernama KM Intan Celebes dilaporkan tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bombana, pada Sabtu pagi, 14 Februari 2026. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun media ini, Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, meski situasi sempat mencekam saat gelombang tinggi menerjang kapal kayu tersebut.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 07.00 WITA itu berlangsung ketika kapal telah mendekati wilayah pesisir Poleang, setelah menempuh perjalanan dari Pelabuhan Bajoe menuju Pelabuhan Boepinang. Menurut informasi awal, kapal dihantam gelombang tinggi yang menyebabkan lambung tidak mampu menahan tekanan air.

Sejumlah rekaman video warga yang beredar di media sosial memperlihatkan para penumpang terom-

bang-ambing di laut. Mereka berusaha bertahan dengan pelampung seadanya, gabus, dan bagian kapal yang masih mengapung. Barang muatan pun tampak berserakan di permukaan air, memperlihatkan kepanikan yang terjadi.

Proses evakuasi berlangsung cukup cepat karena beberapa kapal nelayan berada tidak jauh dari titik kejadian. Para nelayan segera menolong penumpang yang tercebur ke laut dan membawa mereka ke daratan terdekat. "Kami hanya berpikir bagaimana menyelamatkan orang-orang itu," kata salah satu nelayan yang turut mengevakuasi korban.

Selain itu, sejumlah penumpang yang mengalami kelelahan dan syok langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Hingga siang hari, seluruh penumpang dikabarkan dalam kondisi stabil, meski sebagian masih menjalani observasi medis.

Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti tenggelamnya KM Intan Celebes. Du-

gaan awal mengarah pada cuaca ekstrem berupa gelombang tinggi dan angin kencang yang sudah beberapa hari melanda wilayah Teluk Bone. "Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kapal, cuaca, dan kelayakan pelayaran," kata seorang petugas dari otoritas keselamatan pelayaran.

Secara historis, kecelakaan kapal di wilayah perairan Sulawesi bukanlah hal baru. Teluk Bone tercatat sebagai salah satu perairan rawan kecelakaan di Indonesia. Pada 2018, misalnya, KM Lestari Maju tenggelam di perairan Selayar dan menyebabkan puluhan korban jiwa. Secara global, kecelakaan serupa juga pernah terjadi, seperti tenggelamnya kapal feri MV Sewol di Korea Selatan pada 2014 yang menyita perhatian dunia karena banyaknya korban pelajar.

Kejadian KM Intan Celebes kali ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan dalam pelayaran rakyat yang masih banyak menggunakan kapal kayu. Fak-

tor cuaca, kondisi kapal, dan kapasitas muatan kerap menjadi tantangan sekaligus risiko yang harus diantisipasi oleh operator pelayaran maupun otoritas terkait.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi kejadian telah dinyatakan terkendali. Aparat gabungan terus memantau kondisi perairan Poleang mengingat potensi cuaca buruk masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Pemerintah daerah dan otoritas pelabuhan mengimbau seluruh pelaku pelayaran untuk memperhatikan prakiraan cuaca sebelum berlayar. Peringatan dini terus dikeluarkan oleh Badan Meteorologi mengingat tingginya potensi gelombang di wilayah perairan Sulawesi pada Februari.

Meski demikian hingga berita ini diterbitkan belum ada informasi resmi dari pihak berwenang mengenai keadaan kapal, jumlah penumpang dan penyebab tenggelamnya kapal kayu tersebut. (*)

Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Bernuansa Cuci Tangan



Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tahun 2019 sebagai murni inisiatif legislatif menuai kritik dari kalangan akademisi. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai pernyataan tersebut beres-beresnya menghapus jejak keterlibatan pemerintah dalam proses yang dinilai publik sebagai kelemahan lembaga antirasuah.

Polemik ini kembali mencuat setelah wacana pengembalian UU KPK ke versi sebelum revisi disuarakan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, dan kemudian disambut positif oleh Jokowi. Situasi tersebut memicu sorotan baru terkait konsistensi sikap pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Ubedilah menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip ketatanegaraan, setiap undang-undang adalah produk bersama antara DPR dan pemerintah. Karena itu, tidak tepat bila pemerintah menyebut revisi UU KPK 2019 sepenuhnya merupakan inisiatif legislatif. "Undang-undang bukanlah produk tunggal parlemen," ujarnya.

Ia mengungkap adanya bukti keterlibatan eksekutif melalui surat Presiden Nomor 42/Pres/09/2019 tertanggal 11 September 2019, yang menunjuk wakil pemerintah untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR. "Faktanya Jokowi saat itu membuat surat kepada DPR untuk membahas RUU KPK," kata Ubed-

ilah.

Menurutnya, keberadaan surat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah turut serta dalam seluruh proses pembahasan. Karena itu, ia menilai klaim Jokowi baru-baru ini sebagai upaya menghindari kritik. "Jika sekarang Jokowi bilang tidak terlibat, itu pernyataan yang bernuansa cuci tangan," tegasnya.

Selain aspek pembahasan, Ubedilah menyoroti sikap pemerintah yang tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi meski terdapat desakan luas dari akademisi dan tokoh masyarakat. "Fakta empiriknya, Jokowi tidak mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU itu," ujarnya.

Revisi UU KPK 2019 memiliki implikasi besar, salah satunya menempatkan KPK ke rumpun eksekutif. Perubahan itu kemudian membuka jalan bagi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemberhentian puluhan pegawai berintegritas. "Hasilnya menyingkirkan 58 pegawai KPK yang dikenal memiliki integritas," kata Ubedilah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menanggapi wacana mengembalikan UU KPK lama dengan mempertanyakan logika hukum dari gagasan tersebut. "Apanya yang mau dikembalikan? UU itu bukan barang pinjaman," ujarnya.

Tanak menegaskan bahwa KPK adalah lembaga eksekutor, bukan pem-

buat undang-undang. Ia menyatakan bahwa sejauh ini operasional KPK berjalan tanpa hambatan berdasarkan UU KPK lama dan baru. Ia juga menilai status kepegawaian yang kini berada dalam sistem ASN membahayakan kepastian hukum.

Namun, Tanak mengusulkan gagasan alternatif bila tujuan revisi adalah memperkuat independensi. Ia menilai KPK lebih tepat ditempatkan dalam rumpun yudikatif bersama Mahkamah Agung agar terhindar dari potensi intervensi politik. "KPK bisa berdiri sendiri berdampingan dengan MA," ujarnya.

Secara historis, revisi UU KPK 2019 memicu demonstrasi besar mahasiswa di berbagai daerah, dikenal sebagai "gelombang September 2019", salah satu gerakan terbesar pas-careformasi. Secara global, sejumlah negara seperti Hong Kong dan Korea Selatan pernah menghadapi kontroversi serupa ketika pemerintah dianggap berpotensi melemahkan lembaga antikorupsi mereka.

Gelombang kritik terbaru ini menambah panjang daftar perdebatan mengenai arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Dukungan Jokowi terhadap pengembalian UU KPK lama kini dinilai bertentangan dengan sikap pemerintahannya saat revisi dilakukan. Mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, bahkan menyebut sikap Jokowi sebagai "kontradiktif" karena kelemahan KPK terjadi di bawah kepemimpinannya. (*)

Bapas Baubau Libatkan Klien Dalam Aksi Bersih Islamic Center



Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Upaya meningkatkan reintegrasi sosial klien pemsyarakatan kembali diwujudkan Balai Pemsyarakatan (Bapas) Kelas II Baubau melalui aksi bersih-bersih di Masjid Islamic Center Kota Baubau pada Jumat, 13 Februari 2026. Kegiatan yang melibatkan klien pemsyarakatan ini digelar sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan berbasis kegiatan sosial di lingkungan masyarakat.

Aksi sosial tersebut dimulai sejak pukul 09.00 WITA dan berlangsung di kawasan Kelurahan Wameo, Kota Baubau. Para klien yang terlibat ditugaskan untuk membersihkan area masjid, halaman, hingga fasilitas penunjang ibadah, dipandu langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari perangkat pemerintahan setempat, seperti Lurah Wameo, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Ketua RT dan RW yang hadir untuk memantau pelaksanaan. Kolaborasi lintas unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat

proses reintegrasi sosial klien.

Dalam pelaksanaannya, aksi ini diawali dengan apel pengarahannya yang dipimpin Kepala Bapas Kelas II Baubau, Nasirudin. Setelah itu, para klien dibagi dalam beberapa kelompok kerja untuk memudahkan penataan tugas dan percepatan pembersihan.

Nasirudin menegaskan bahwa kegiatan sosial ini selaras dengan program Gerakan Nasional Bapas Peduli yang dibangun untuk meningkatkan kesadaran hukum, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial klien. "Kegiatan ini adalah bagian dari pembinaan karakter agar klien mampu berinteraksi kembali dengan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan klien dalam kegiatan pembersihan fasilitas umum menjadi strategi yang terbukti efektif dalam membangun rasa percaya diri dan membuka ruang penerimaan sosial. "Kami ingin mendorong reintegrasi sosial yang lebih positif bagi klien," kata Nasirudin.

Dari sisi pelaksanaan, kegiatan kerja bakti ber-

langsung aman, tertib, dan mendapat respons baik dari masyarakat yang melihat langsung keterlibatan klien. Beberapa warga menilai bahwa aksi seperti ini dapat mengikis stigma negatif terhadap mantan narapidana.

Secara historis, pendekatan pembinaan berbasis kegiatan sosial telah menjadi model yang diterapkan banyak negara dalam proses rehabilitasi. Di Amerika Serikat, program community service mulai digalakkan sejak 1966 sebagai alternatif hukuman ringan. Di Indonesia sendiri, konsep pembinaan sosial bagi klien pemsyarakatan diperkuat melalui kebijakan pemsyarakatan yang dirintis sejak tahun 1964 oleh Menteri Kehakiman Sa-hardjo.

Penguatan program berbasis pemberdayaan masyarakat seperti aksi bersih fasilitas ibadah dinilai mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara klien pemsyarakatan dan masyarakat, sekaligus mengurangi potensi residivisme sebagaimana ditargetkan dalam sistem

pemsyarakatan modern.

Sejumlah klien yang terlibat juga menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kegiatan tersebut. Menurut laporan Pembimbing Kemasyarakatan, para klien menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin tanpa hambatan.

Bapas Kelas II Baubau menegaskan bahwa kegiatan sosial semacam ini akan dilaksanakan secara berkala. Aksi kebersihan di lingkungan rumah ibadah, ruang publik, dan wilayah pemukiman direncanakan menjadi agenda rutin sepanjang tahun 2026.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi ruang pembinaan bagi klien," tutup Nasirudin.

Dengan terselenggaranya aksi ini, Bapas Baubau berharap kesadaran publik terhadap pentingnya dukungan sosial bagi klien pemsyarakatan semakin meningkat sehingga mereka dapat diterima kembali sebagai bagian dari komunitas secara bermartabat. (*)

RDP DPRD - Pemkot Baubau Bahas 1.869 Tenaga Paruh Waktu Baubau Masuk Skema PPPK



Laporan: Amat Jr

BAUBAU, BP-Mekanisme penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kembali menjadi sorotan setelah DPRD Kota Baubau dan Pemerintah Kota Baubau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 11 Februari 2026. Pertemuan tersebut membahas kejelasan status 1.869 tenaga non-ASN yang selama ini bekerja sebagai pegawai paruh waktu di lingkup pemerintahan kota.

Rapat yang berlangsung di gedung legislatif itu dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si, bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta seluruh camat se-Kota Baubau. Agenda ini digelar untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai dasar verifikasi dan penetapan PPPK Paruh Waktu.

Dalam pemaparannya, La Ode Darus Salam menjelaskan bahwa seluruh nama yang telah diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu telah melewati proses verifikasi yang ketat oleh tim verifikasi. "Kita pastikan semua sesuai tahapan. Tim verifikasi bekerja profesional dan tidak terburu-buru menetapkan nama," ujarnya dalam sesi wawancara usai rapat.

Ia menambahkan, verifikasi tersebut penting dilakukan agar seluruh keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Langkah ini juga dianggap lebih akuntabel dibandingkan daerah lain yang, menurutnya, "banyak hanya menetapkan langsung tanpa verifikasi mendalam."

Pembahasan dalam RDP juga menyentuh soal pemberian jasa atau honorarium bagi PPPK Paruh Waktu yang telah menerima SK Wali Kota pada 9 Februari 2026. Besaran jasa tersebut ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan, mulai dari SMA, Sarjana Muda, hingga Sarjana. Pemkot menilai sistem berjenjang ini dapat memberikan keadilan sesuai kualifikasi pegawai.

La Ode Darus Salam juga mendorong seluruh PPPK Paruh Waktu untuk menjaga komitmen pelayanan publik karena pemerintah daerah akan melakukan evaluasi berkala. Evaluasi ini, menurutnya, menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas transformasi tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Baubau, Adriansyah Farmin, ST, memaparkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Ia menyebut bahwa pembentukan tim verifikator oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan aturan selama tetap mengacu pada Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025.

Adriansyah menyampaikan dua rekomendasi utama RDP. Pertama, Pemkot Baubau didorong segera mengajukan nama susulan untuk 708 tenaga non-ASN yang belum masuk dalam daftar usulan sebelumnya. "Ini perlu dilakukan agar tidak ada yang tertinggal dari proses nasional," tegasnya dalam rapat.

Rekomendasi kedua adalah pemanggilan tim veri-

fikator oleh DPRD untuk meminta penjelasan rinci mengenai indikator penilaian yang digunakan dalam mengusulkan 1.881 nama. DPRD menilai transparansi indikator penting agar publik memahami alasan di balik tidak terakomodirnya 708 tenaga lainnya.

Diskusi mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK bukan hal baru dalam kebijakan nasional. Sejak 2021, pemerintah pusat telah mengarahkan seluruh daerah untuk melakukan penyelesaian status tenaga non-ASN secara bertahap hingga 2025 melalui kebijakan zero non-ASN. Langkah serupa pernah dilakukan di beberapa negara, seperti Malaysia dan Filipina, yang juga melakukan transformasi tenaga kontrak menjadi pegawai kontrak pemerintah dengan sistem evaluasi berjenjang.

Dalam konteks Baubau, proses pengalihan status ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti kebijakan nasional serta memastikan kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung layanan publik. RDP ini pun diharapkan membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih transparan dan adil.

Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan bahwa seluruh pihak akan terus berkoordinasi agar proses penetapan PPPK Paruh Waktu dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan kepastian hukum bagi ribuan tenaga non-ASN di Baubau. (*)